



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam suatu organisasi swasta maupun pemerintahan yang baik diperlukan berbagai aktivitas yang harus dilaksanakan secara teratur, efisien dan mengarah, untuk melaksanakan semua itu diperlukan suatu pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang yang diwujudkan di dalam organisasi dari lembaga yang bersangkutan.

Pelimpahan tugas dan wewenang merupakan salah satu bidang yang mempengaruhi kegiatan operasional suatu organisasi di samping bidang-bidang lainnya. Pelimpahan tugas dan wewenang memelihara bermacam-macam fasilitas yang digunakan demi tercapainya tujuan, memungkinkan adanya koordinasi dan juga menciptakan hubungan antara sesama pegawai. Tanpa adanya hubungan yang baik antara sesama pegawai tidak terdapat koordinasi. Tanpa koordinasi yang baik tujuan dari organisasi yang bersangkutan secara nyata tidak ada tercapai secara efisien dan efektif.

Pelimpahan tugas dan wewenang yang dibentuk dari organisasi merupakan alat bagi suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola organisasi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Dengan adanya pelimpahan tugas dan wewenang akan mempermudah bawahan dalam menjalankan tugas-tugasnya, pimpinan dapat mengawasi bawahan sesuai

dengan bentuk organisasi yang dimilikinya

2. Pelimpahan tugas dan wewenang akan mempermudah kerja sama antara seksi yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Dengan demikian disini dapat disimpulkan bahwa pelimpahan tugas dan wewenang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan secara efisien. Peranan penting dari suatu bentuk pelimpahan tugas dan wewenang tersebut mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian dengan menuangkannya di dalam bentuk skripsi.

Satu hal yang ditemukan dalam latar belakang objek penelitian ini adalah pelaksanaan dari pelimpahan tugas dan wewenang yang diterapkan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Madina, yaitu pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang tidak mencerminkan bentuk organisasi yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Keadaan tersebut memberikan arti bahwa terkadang bawahan menerima perintah dari yang bukan atasannya. Tataan kerja serta ruang lingkup wewenang dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Madina mencerminkan kekomplekan tugas sehingga bukan suatu hal yang mustahil bahwa pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang tidak mencerminkan bentuk organisasi yang dimilikinya.

Di satu sisi bawahan sebagai objek pelimpahan tugas dan wewenang merasakan suatu hal yang bertolak belakang, sehingga pelimpahan tugas dan wewenang yang tidak sinkron tersebut memberikan suatu beban mental bahwa tugas yang diperintahkan tersebut bukanlah merupakan tugasnya. Sehingga dari hal tersebut dapat dirasakan bahwa produktivitas para pegawai sebagai bawahan